

Implikasi Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan: Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien

Christine S T Kansil¹ Rachel Adeline Siregar²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ rachel.205230387@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Dalam konteks ini, hukum kesehatan berfungsi untuk menjaga hak dan kewajiban antara tenaga medis dan pasien. Berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur standar dan etika dalam pelayanan medis. Tenaga medis wajib memberikan layanan yang profesional dan menghormati hak pasien, seperti hak atas informasi dan persetujuan, sementara pasien berkewajiban memberikan informasi yang akurat. Namun, masalah hukum seperti malpraktik dan pelanggaran hak pasien sering terjadi, yang menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum dalam pelayanan kesehatan. Era digitalisasi dan pandemi juga menghadirkan tantangan baru, seperti keamanan data dan persetujuan medis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini membahas implikasi hukum dalam pelayanan kesehatan, menyoroti pentingnya edukasi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk mencegah konflik dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berkualitas.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Hak Dan kewajiban, Tenaga Medis, Pasien

Abstract

Health services play an important role in fulfilling human rights, especially the right to health. In this context, health law serves to protect the rights and obligations between medical personnel and patients. Various regulations, such as Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, regulate standards and ethics in medical services. Medical personnel are required to provide professional services and respect patient rights, such as the right to information and consent, while patients are required to provide accurate information. However, legal issues such as malpractice and violations of patient rights often occur, which shows the importance of understanding and implementing the law in health services. The era of digitalization and the pandemic also presents new challenges, such as data security and electronic medical consent. Therefore, this study discusses the legal implications in health services, highlighting the importance of education and compliance with regulations to prevent conflict and improve the quality of services. By understanding each other's rights and obligations, it is hoped that a fairer, more transparent, and quality health service system can be created.

Keywords: Health Law, Health Services, Rights and Obligations, Medical Personnel, Patients



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi hak asasi manusia, pelayanan kesehatan sangat penting, terutama dalam hal hak atas kesehatan. Aspek hukum sangat penting untuk menjaga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, baik tenaga medis maupun pasien, dalam upaya memberikan layanan yang berkualitas. Dalam situasi ini, hukum kesehatan berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa pelayanan medis dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur hukum kesehatan. Tampubolon, N. (2022).¹ Sebagai penyedia layanan kesehatan, tenaga medis harus mengikuti standar profesi dan kode etik. Mereka tidak hanya harus memberikan layanan medis dengan ahli dan hati-hati, tetapi juga harus menghormati hak pasien seperti hak atas informasi, persetujuan, dan kerahasiaan medis. Sebaliknya, pasien harus memberikan informasi yang akurat dan akurat tentang kondisi kesehatannya dan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh fasilitas kesehatan mereka. Untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal, sangat penting ada hubungan yang sehat antara tenaga medis dan pasien. Rahmadani, N. R. (2024).² Meskipun demikian, masalah hukum sering terjadi di dunia nyata yang melibatkan kedua belah pihak. Misalnya, kasus malpraktik, kelalaian, atau pelanggaran hak pasien adalah beberapa contoh nyata dari konsekuensi hukum yang dapat muncul dalam pelayanan kesehatan. Hukum berfungsi dalam situasi seperti ini untuk menyelesaikan konflik dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Misalnya, pasien memiliki hak untuk menggugat jika terjadi dugaan malpraktik, sementara tenaga medis harus bertanggung jawab atas tindakan medis yang mereka lakukan. Hak-hak kedua belah pihak harus dilindungi dan proses hukum harus dilakukan secara adil dan terbuka.

Selain itu, pandemi dan era digitalisasi membawa tantangan baru untuk hukum kesehatan. Layanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine memungkinkan pasien untuk mendapatkan lebih banyak layanan, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait keamanan data pasien dan persetujuan medis elektronik. Oleh karena itu, untuk tetap relevan dan efektif dalam menjamin hak dan kewajiban semua pihak, regulasi hukum kesehatan harus selalu berubah sesuai dengan kemajuan. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan sangat penting bagi pasien dan tenaga medis. Tidak hanya untuk mencegah kemungkinan konflik, tetapi juga untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan bertanggung jawab satu sama lain. Tulisan ini akan membahas secara menyeluruh konsekuensi hukum dalam pelayanan kesehatan, dengan penekanan khusus pada hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien, serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Dengan memahami elemen hukum ini secara menyeluruh, diharapkan dapat diciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Chairunisah, N. (2023).³

Tinjauan Pustaka

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pelayanan ini melibatkan hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien yang diatur oleh regulasi seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hak pasien mencakup akses informasi dan persetujuan medis, sementara tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi. Tantangan dalam pelayanan ini meliputi malpraktik, ketimpangan akses, dan perkembangan telemedicine. Penerapan hukum yang adil sangat penting guna memastikan hubungan harmonis dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

¹ Tampubolon, N. (2022). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

² Rahmadani, N. R., & Pramesti, N. A. T. (2024). *Peran Kode Etik Profesi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 45-48.

³ Chairunisah, N., & Santoso, G. (2023). *Karakter Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Abad ke-21 di Era Digital*. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(5), 452-475.

Tenaga Medis

Tenaga medis memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mereka bekerja sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain memiliki hak atas perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang aman, tenaga medis juga berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien serta memberikan layanan profesional dan etis. Tantangan yang dihadapi meliputi beban kerja tinggi, keterbatasan tenaga di daerah terpencil, serta tuntutan beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti telemedicine.

Pasien

Pasien adalah individu yang menerima layanan medis untuk pemeriksaan, pengobatan, atau rehabilitasi kesehatan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi jelas terkait diagnosis dan prosedur, memberikan persetujuan sebelum tindakan medis, serta menjaga privasi data kesehatan. Di sisi lain, pasien juga berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan mematuhi instruksi medis. Hubungan yang baik antara pasien dan tenaga medis penting untuk mencapai hasil perawatan optimal. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, kesenjangan informasi, dan privasi data dalam era digital sering menghambat pemenuhan hak pasien. Regulasi kesehatan diperlukan untuk memastikan layanan yang adil, transparan, dan berkualitas bagi setiap pasien.

Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah konsep yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara seimbang. Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi medis, privasi, serta layanan tanpa diskriminasi, namun juga berkewajiban memberikan informasi kesehatan yang akurat dan mengikuti instruksi medis. Tenaga medis, di sisi lain, berhak atas perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang aman, tetapi wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan menjaga kerahasiaan pasien. Regulasi seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membantu memastikan hak dan kewajiban ini terpenuhi. Keseimbangan dalam pelaksanaannya penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan adil bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Hukum dalam pelayanan kesehatan memiliki peran krusial dalam melindungi hak pasien dan memastikan tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan berkualitas. Dengan adanya kerangka hukum ini, pasien merasa lebih aman karena hak-hak mereka dilindungi dan diakui. Salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hukum pelayanan kesehatan adalah penerapan informed consent. Proses ini mewajibkan pasien memberikan persetujuan setelah menerima penjelasan lengkap mengenai prosedur medis, termasuk risiko dan manfaatnya. Pemahaman yang baik tentang prosedur yang akan dijalani dapat mengurangi kecemasan pasien dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap tenaga

medis. Namun, jika informasi yang memadai tidak disampaikan, hal ini dapat memicu sengketa hukum, terutama dugaan malpraktik. Konsekuensinya dapat berupa sanksi perdata atau pidana bagi tenaga kesehatan, yang dapat merugikan baik individu maupun institusi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi sangat diperlukan, tidak hanya bagi tenaga medis tetapi juga bagi institusi kesehatan secara keseluruhan. Edukasi yang memadai bagi pasien dan tenaga medis mengenai hak dan kewajiban masing-masing menjadi kunci untuk mencegah potensi masalah hukum di masa depan. Ini termasuk pelatihan berkala bagi tenaga medis untuk memastikan mereka mengikuti perkembangan terkini dalam praktik terbaik. Selain itu, upaya untuk meningkatkan komunikasi antara pasien dan tenaga medis juga sangat penting. Dengan komunikasi yang terbuka, harapan dan kekhawatiran pasien dapat dipahami lebih baik, mencegah munculnya konflik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan yang harmonis antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dapat tercipta, berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan berkeadilan. Riyanto, O. S. (2023).⁴

Implikasi Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis Dan Pasien

Untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, penting bahwa tenaga medis dan pasien memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum, lingkungan kerja yang aman, serta kesempatan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Hak-hak ini sangat penting untuk mendukung mereka dalam memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menjaga kerahasiaan data pasien. Tenaga medis wajib memberikan pelayanan dengan kompetensi tinggi dan menghormati hak pasien untuk menerima informasi yang jelas dan komprehensif. Hal ini mencakup memberikan penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, prosedur yang akan dilakukan, serta risiko dan manfaat dari tindakan medis tersebut. Pentingnya menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan relevan tidak bisa diabaikan, karena hal ini mendukung pasien dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan mereka. Hubungan yang baik antara tenaga medis dan pasien menjadi kunci untuk mencegah perselisihan serta sengketa hukum di masa depan. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang terbuka antara kedua pihak sangat penting untuk membangun kepercayaan. Untuk mencapai tujuan ini, upaya untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi harus didukung oleh edukasi yang memadai bagi pasien dan tenaga medis, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pendidikan yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak akan membantu menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik. Dengan cara ini, dapat tercipta ekosistem kesehatan yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak merasa dihargai dan aman, serta layanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Keseluruhan sistem akan berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Dampak dari hukum dalam pelayanan kesehatan sangat luas, mempengaruhi tenaga medis, pasien, dan institusi kesehatan secara keseluruhan. Tenaga medis diwajibkan untuk mematuhi standar profesi yang berlaku; kelalaian dalam menjalankan tugas, seperti malpraktik, dapat berujung pada sanksi hukum yang berat, termasuk tuntutan pidana atau perdata. Hal ini menuntut tenaga medis untuk selalu menjaga kualitas pelayanan dan

⁴ Riyanto, O. S., Fuad, F., & Chrisjanto, E. (2023). *Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien*. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 77-87.

meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan layanan yang aman dan efektif. Bagi pasien, hukum memberikan perlindungan atas hak-hak fundamental, seperti hak atas informasi dan kerahasiaan data medis. Namun, seringkali kurangnya pemahaman pasien tentang hak-hak ini dapat memicu konflik dan sengketa, terutama ketika pasien merasa hak mereka dilanggar. Situasi ini dapat mengarah pada ketidakpuasan yang berujung pada tuntutan hukum. Di sisi lain, institusi kesehatan juga terikat pada regulasi yang mengatur operasional layanan mereka. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dapat mengakibatkan tuntutan hukum atau bahkan pencabutan izin operasional, yang berdampak serius pada kelangsungan institusi. Sengketa hukum yang muncul tidak hanya merugikan reputasi institusi, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta melakukan pengawasan yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tenaga medis dan pasien, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.

Upaya Penyempurnaan Dan Solusi

Hak dan kewajiban baik tenaga medis maupun pasien harus menjadi fokus utama dalam upaya penyempurnaan hukum pelayanan kesehatan. Tenaga medis, sebagai penyedia layanan, perlu dilatih secara teratur agar memahami regulasi terbaru, serta pentingnya penerapan informed consent secara konsisten. Pelatihan ini sangat krusial, mengingat banyak sengketa hukum yang muncul akibat komunikasi yang tidak jelas antara pasien dan tenaga medis. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi dan prosedur yang benar, tenaga medis dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada pasien mengenai diagnosis, tindakan yang akan dilakukan, serta risiko dan manfaatnya, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Di sisi lain, pasien juga harus diberikan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka. Hak-hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan kesehatan, akses terhadap informasi yang relevan, persetujuan tindakan medis, serta perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi mereka. Edukasi tentang hak-hak ini akan memungkinkan pasien untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya dan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan yang mereka terima. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, diperlukan pengawasan yang lebih baik dalam menjalankan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Pengawasan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Selain itu, untuk mencegah proses hukum yang panjang dan rumit, penting untuk mengembangkan mediasi yang jelas dan efektif sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah ini, hubungan antara tenaga medis dan pasien dapat lebih harmonis, menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mendorong tenaga medis untuk bekerja dengan lebih baik, sehingga keseluruhan sistem kesehatan dapat berfungsi dengan optimal.

KESIMPULAN

Hukum sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis dalam bidang pelayanan kesehatan. Regulasi ini menjamin bahwa layanan kesehatan diberikan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tenaga medis diharuskan untuk mematuhi standar profesi dan kode etik, termasuk kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Sementara itu, pasien berhak atas informasi medis yang jelas dan kerahasiaan; pasien juga berkewajiban memberikan informasi medis yang akurat agar tenaga

medis dapat melakukan diagnosis dan tindakan yang tepat. Untuk mencegah kelalaian atau malpraktik yang dapat menyebabkan sengketa hukum antara pasien dan tenaga medis, penerapan undang-undang ini sangat penting. Namun, masalah seperti ketidaktahuan tentang undang-undang dan kemajuan teknologi seperti telemedicine harus ditangani dengan serius. Untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban masing-masing, baik tenaga medis maupun pasien harus dilatih dan dididik. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat diperlukan terhadap praktik layanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas tinggi, dan sejalan dengan hak asasi manusia dapat dicapai dengan kolaborasi yang baik antara regulasi dan pelaku kesehatan. Ini akan melindungi pasien dan memberikan perlindungan dan dukungan yang layak bagi tenaga medis saat mereka bekerja.

DAFTAR PUSAKA

- Chairunisah, N., & Santoso, G. (2023). Karakter Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Abad ke-21 di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(5), 452-475.
- Rahmadani, N. R., & Pramesti, N. A. T. (2024). Peran Kode Etik Profesi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 45-48.
- Riyanto, O. S., Fuad, F., & Chrisjanto, E. (2023). Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 77-87.
- Tampubolon, N. (2022). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.